

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh pemberi mandat kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Untuk itu disusunlah suatu laporan yang dapat mengukur kinerja instansi pemerintah, mengevaluasi serta mengungkapkan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud. Adapun laporan kinerja dimaksud bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terukur tentang kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018 dimaksudkan sebagai peran serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018 diharapkan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi di tahun yang akan datang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi, nomor 31 Tahun 2008, Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi, nomor 31 Tahun 2008 terdiri dari :

- (1) Kepala;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- (4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
- (5) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
- (6) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi memiliki peran penting bagi lembaga pemerintah, dan begitu pula bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, peran perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya perencanaan kinerja, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan lebih sulit untuk dilakukan terhadap organisasi.
2. Merupakan dokumen yang memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya perencanaan kinerja, tentunya *pemangku kepentingan* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan dan telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen pertanggungjawaban dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan kebutuhan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja yang akan dicapai.

Perencanaan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2016-2021 khususnya misi pertama yaitu :

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik ”

Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 30 September 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai Pusat Pembelajaran (*Learning Center*) bagi Aparatur di Provinsi Jambi.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

B. VISI

Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas “**

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi perlu ditanamkan pada setiap unsur sehingga menjadi visi bersama (*share vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan sumber daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

C. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut dirumuskan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna.
2. Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang memadai, efektif, efisien dan akuntabel.

D. TUJUAN

Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif.
2. Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur.

E. SASARAN

Untuk menghasilkan tujuan sebagaimana yang diuraikan, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Meningkatnya sumber daya kediklatan yang memadai.

F. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- b. Menyusun Rencana Program Manajemen Pelayanan Kediklatan.
- c. Menyusun Rencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- d. Menyusun Rencana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- e. Menyusun Rencana Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- f. Menyusun Rencana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal)
- g. Menyusun Rencana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

G. KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2018 memiliki 7 program dan 28 kegiatan dengan dukungan APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 13.000.00.000,- (Tiga belas milyar rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Program dan Kegiatan
Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
Tahun 2018 (setelah Perubahan Anggaran)

No	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Pnyediaan pelayanan keamanan kantor
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
		Keikutsertaan Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/pembinaan kediklatan dalam dan luar daerah
		Pelayanan dokumentasi, publikasi dan arsip
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Pembangunan Gedung Kantor

		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	
		Pengadaan Pakaian Dinas
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD
6	Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM aparatur
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur
5	Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur	
		Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengemb Kelembagaan
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial
	JUMLAH	

H. PENETAPAN KINERJA

Meskipun terdapat Perubahan atau pergeseran Anggaran BPSDM Provinsi Jambi untuk Tahun 2018, namun Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk Tahun 2018 adalah tetap sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana tertera pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan	Persentase peserta pengembangan SDM yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik	97%
	Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi	72%
Meningkatnya sumber daya kelmbagaan pengembangan SDM yang memadai	Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur	82%

Adapun dalam rangka mencapai target yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 di atas, maka telah disusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Diklat Kepemimpinan Tk. III dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - c. Diklat Kepemimpinan Tk. III Kontribusi dengan target peserta sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang
 - d. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Kontribusi dengan target peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang
 - e. Diklat Komunikasi dan Public speaking dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - f. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat dengan target peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Desa dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - b. Diklat Teknis Inti Kewirausahaan Purnabhakti ASN dengan target peserta sebanyak 30 (tiga Puluh) orang.
 - c. Diklat Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - d. Diklat Teknis Pembina/Pengawas Koperasi dan UKM dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - e. Diklat Teknis Prosedur Ekspor dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

- f. Diklat Teknis Inti Kehumasan dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - g. Diklat Teknis Inti Dasar-dasar AMDAL dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - h. Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - i. Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan dengan target peserta sejumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Diklat Management Of Train (MOT) dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - b. Diklat Perumusan Standar Kompetensi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - c. Diklat Training Of Course dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - d. Diklat Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - e. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi / Uji Kompetensi dengan target peserta sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang.
 - f. Diklat Analisis Pengembangan Kompetensi Bagi ASN dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis umum dan Fungsional bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Bimtek penyusunan DUPAK bagi Widyaiswara target peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

- b. Workshop penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- c. Diklat pengembangan kompetensi arsiparis dilingkungan Pemprov/kab/kota dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- d. Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru SMA dan SMK dengan target peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang (2 Angkatan).
- e. Diklat penyusunan DUPAK bagi Guru SMA/SMK se provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- f. Diklat pengembangan kompetensi pustakawan se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- g. Diklat Revolusi Mental bagi ASN/ pengembangan kompetensi karakter kebangsaan ASN dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- h. Diklat pengembangan kompetensi penyuluhan pertanian se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- i. Diklat Manajemen Pembangunan bagi ASN se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga Puluh) orang.
- j. Diklat Pengembangan Budaya Organisasi bagi ASN se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- k. Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pad Inspektorat Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Dengan demikian maka jumlah peserta yang menjadi target pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) orang ASN.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif maupun kuratif yang diambil oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi/capaian dari setiap indikator yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan rencana/target dan realisasi/capaian Rencana Kerja (Renja), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018 melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan, telah merealisasikan keluaran yang menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat penunjang yaitu melalui program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (internal), program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program manajemen pelayanan kegiatan maupun kegiatan pokok dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pada/di bidang manajerial, bidang teknis inti, bidang teknis umum dan fungsional serta bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan

kelembagaan. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk pengukuran kinerja telah diuraikan pada bab sebelumnya

a. Metoda Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran dilakukan terhadap realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018. Karena semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Capaian 95% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
- b. Capaian 80% s.d <95% dari rencana = berhasil
- c. Capaian 65% s.d <80% dari rencana = cukup berhasil
- d. Capaian s.d <65% dari rencana = kurang berhasil

b. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018 per sasaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, BPSDM Provinsi Jambi memiliki dua sasaran strategis yaitu :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan.

Capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu peserta pengembangan SDM yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik, peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi baik. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1a
BPSDM Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
Persentase peserta pengembangan SDM yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik	97%	92,14%	94,99%

Realisasi jumlah seluruh peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan BPSDM Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah 1084 (seribu delapan puluh empat) orang yang terbagi dalam 32 (tiga puluh tiga) jenis diklat. Dari seluruh peserta yang hadir, yang mengikuti ujian kelulusan adalah sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) peserta. Dari 1084 orang peserta yang mengikuti ujian, ada 1 (satu) peserta Diklat PIM IV Angkatan XI yang dinyatakan gagal/tidak lulus, dan peserta diklat mendapat predikat kelulusan dengan nilai minimal baik sebanyak 1083 (seribu delapan puluh tiga) peserta, sehingga tingkat realisasi indikator kinerja adalah 92,14% dari target 97%.

Dengan menggunakan rumus capaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada point a di atas, maka diperoleh persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis pertama yaitu **94,99% (berhasil)**.

Adapun rincian jenis diklat dan jumlah peserta yang lulus dengan nilai kompetensi minimal baik adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Rincian peserta yang telah selesai dan lulus ujian diklat pada
BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Jenis Diklat	Target Peserta	Realisasi Peserta	Mengikuti Ujian	Lulus Predikat minimal Baik	Lulus Predikat < Baik	Persentase capaian
<i>Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial bagi PNS</i>							
1	Diklat Kepemimpinan Tk. III	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
2	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
3	Diklat Kepemimpinan Tk. III	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	-	100%
4	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	21 orang	21 orang	20 orang	20 orang	-	95,24 %
5	Diklat Komunikasi dan Publik Speaking	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
6	Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	26 orang	26 orang	26 orang	26 orang	-	100%
<i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti Bagi PNS</i>							
7	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Desa	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
8	Diklat Teknis Inti Kewirausahaan Purnabhakti	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
9	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Pasar Tradisional	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
10	Diklat Teknis Inti Pembinaan/Pengawasan Koperasi dan UKM	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
11	Diklat Teknis Inti Prosedur Ekspor	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
12	Diklat Teknis Inti Kehumasan	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
13	Diklat Dasar-dasar Amdal	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%

14	Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
15	Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
<i>Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan</i>							
16	Diklat Manajemen Of Train (MOT)	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
17	Diklat Perumusan Standar Kompetensi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
18	Diklat Training Of course (TOC)	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
19	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
20	Diklat Analisis Pengembangan Kompetensi Bagi ASN	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
<i>Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi teknis umum dan fungsional bagi PNS</i>							
22	Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Widyaiswara	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	-	100%
23	Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) i Widyaiswara	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
24	Diklat Pengembangan Kompetensi Arsiparis se- Provinsi Jambi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
25	Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA dan SMK (2 angkatan)	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	-	100%
26	Diklat Penyusunan DUPAK Bagi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%

	Guru SMA dan SMK						
27	Diklat Pengembangan Kompetensi Pustakawan Se-Provinsi Jambi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
28	Diklat Revolusi Mental bagi ASN/ Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan ASN	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
29	Diklat Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian se-Provinsi Jambi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
30	Diklat Manajemen Pembangunan bagi ASN se-Provinsi Jambi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
31	Diklat Pengembangan Budaya Organisasi bagi ASN Se-Provinsi Jambi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
32	Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	-	100%
	TOTAL	1084 orang	1084 orang	1083 orang	1083 orang	-	99,91 %

Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1b
BPSDM Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi	72%	00%	00%

Tidak dapat dilaksanakan karena Diklat Pimpemdagri dan kegiatan sertifikasi kompetensi/uji kompetensi pemerintah tidak jadi dilaksanakan dana dilakukan pergeseran melalui APBDP.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan SDM yang memadai.

Capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2
BPSDM Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
Peserta diklat yang menyatakan minimal puas terhadap pelayanan pengembangn SDM aparatur	82%	81,53%	99,43%

Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan pelaksanaan kediklatan, disusunlah Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Diklat pada BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2018.

Instrumen disusun untuk menjangkau 17 komponen pelayanan kediklatan yaitu :

1. Pelayanan Panitia dan Petugas Piket.
2. Kenyamanan Ruang Kelas
3. Fasilitas Ruang Kelas yang menunjang kegiatan belajar
4. Kebersihan Ruang Kelas
5. Kebersihan Kamar Kecil/Toilet
6. Kenyamanan Ruang dan Lingkungan Asrama
7. Fasilitas Belajar di Asrama
8. Fasilitas untuk istirahat/hiburan di Asrama
9. Kebersihan Ruang Asrama
10. Kerapihan Petugas Asrama
11. Keamanan di Asrama selama mengikuti diklat
12. Ketersediaan fasilitas tempat ibadah untuk peserta diklat
13. Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk peserta diklat
14. Ketersediaan sumber belajar/buku-buku perpustakaan
15. Ketersediaan sumber belajar melalui internet
16. Pelayanan petugas catering/konsumsi peserta
17. Keamanan kendaraan pribadi selama mengikuti diklat

Dari seluruh peserta yang mengikuti diklat, di ambil sample sebanyak 46 orang. Setelah dilakukan perhitungan Indeks Kepuasan diperoleh data bahwa sebanyak 81,53% peserta merasa minimal puas dengan pelayanan pelaksanaan diklat BPSDM. Sementara target kinerja adalah 90%.

Dengan menggunakan rumus capaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada point a di atas, maka diperoleh persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis kedua yaitu **99,43% (sangat berhasil)**.

Adapun rincian tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan pelaksanaan diklat adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 6

Tingkat Kepuasan Peserta Diklat terhadap Pelayanan Pelaksanaan Kediklatan di BPSDM Provinsi Jambi

No	Komponen Pelayanan	Kurang Memuaskan		Memuaskan		Total Responden
		Jumlah	Perentase	Jumlah	Perentase	
1	Pelayanan Panitia dan Petugas Piket.	7	20,00%	39	84,78%	46
2	Kenyamanan Ruang Kelas	2	5,71%	44	95,65%	46
3	Fasilitas Ruang Kelas yang menunjang kegiatan belajar	1	2,70%	43	97,73%	44
4	Kebersihan Ruang Kelas	3	7,50%	43	93,48%	46
5	Kebersihan Kamar Kecil/Toilet	20	76,92%	26	56,52%	46
6	Kenyamanan Ruang dan Lingkungan Asrama *)	3	12,50%	24	88,89%	27
7	Fasilitas Belajar di Asrama *)	7	35,00%	20	74,07%	27
8	Fasilitas untuk istirahat/hiburan di Asrama *)	10	58,82%	17	62,96%	27
9	Kebersihan Ruang Asrama *)	5	22,73%	22	81,48%	27
10	Kerapihan Petugas Asrama *)	2	8,00%	25	92,59%	27
11	Keamanan di Asrama selama mengikuti diklat *)	2	9,52%	25	92,59%	27
12	Ketersediaan fasilitas tempat ibadah untuk peserta diklat	7	22,58%	39	84,78%	46
13	Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk peserta diklat	15	48,39%	31	67,39%	46
14	Ketersediaan sumber belajar/buku-buku perpustakaan	18	66,67%	28	60,87%	46
15	Ketersediaan sumber belajar melalui internet	11	37,93%	35	76,09%	46
16	Pelayanan petugas catering/konsumsi peserta	8	22,22%	38	82,61%	46
17	Keamanan kendaraan pribadi selama mengikuti diklat	2	5,26%	44	95,65%	46

	Total Jumlah/Persentase	123	18,47%	543	81,53%	666
--	------------------------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

^{*)} = Khusus untuk peserta diklat yang menginap

Meskipun termasuk kategori sangat berhasil, namun tingkat capaian kinerja untuk indikator **sasaran ketiga** ini belum maksimal dikarenakan :

1. Kurangnya pengawasan kebersihan kamar kecil yang dilakukan oleh petugas kebersihan, terutama ketika berjalannya kegiatan diklat.
2. Tidak ada petugas pengelola di gedung perpustakaan, terutama ketika berjalannya kegiatan diklat.

Untuk mengatasi hal ini ke depannya akan ditingkatkan lagi pengawasan terhadap pihak rekanan yang memberikan jasa kebersihan kantor agar dapat dilakukan pengaturan petugas kebersihan secara lebih efektif sehingga dapat mengakomodir kebersihan seluruh kamar kecil terutama ketika kegiatan diklat sedang berjalan. Sementara untuk mengatasi tidak ada petugas, ke depannya akan menempatkan petugas yang mengelola perpustakaan tersebut.

c. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018 per tujuan

Pada tahun 2018, BPSDM Provinsi Jambi memiliki dua tujuan yang diwujudkan dalam dua sasaran strategis sebagaimana telah dijelaskan pada point b di atas. Tujuan tersebut masing-masing dinilai **sangat berhasil dan berhasil**, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan
Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian Indikator Kinerja Tujuan	Kategori
1	Mengembangkan sistem pengembangna SDM aparatur yang efektif	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan.	103,00%	Sangat Berhasil
		Persentase pesrta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi	-	-
2	Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur	Meningkatnya sumber daya kediklatan yang memadai.	99,43%	Sangat Berhasil

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2018 adalah merupakan tahun ketiga dari Periode Renstra BPSDM 2016-2021. Dengan demikian belum dapat dibandingkan tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penyempurnaan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator untuk periode Renstra saat ini; menyesuaikan dengan penyempurnaan RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021. Meskipun demikian dapat dijabarkan bahwa untuk periode 2016-2021, target realisasi capaian kinerja dari BPSDM Provinsi Jambi diharapkan berada dalam kategori “**sangat berhasil**” untuk setiap target rencana capaian kinerja. Adapun target rencana capaian kinerja tujuan BPSDM

Provinsi untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

Rencana Capaian Kinerja Tujuan
BPSDM Provinsi Jambi Periode 2016-2021

No	Tujuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif	95%	95%	92%	93%	94%	95%
2.	Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur	90%	88%	82%	83%	84%	85%

Untuk Tahun 2018, capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 9

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan.	Persentase peserta pengembangan SDM dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik	97%	99,14%	103%	Berhasil
		Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis	72%	-	-	-

		kompetensi				
2.	Meningkatnya sumber daya pengembangan SDM yang memadai.	Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur	82%	81,53%	99,43%	Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya :

Untuk Indikator Sasaran Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi merupakan indikator tambahan pada saat usulan penyusunan perubahan RPJMD tahun 2016-2021, sehingga capaian diukur pada tahun 2018.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian			Rata-rata capaian
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan.	Persentase peserta pengembangan SDM dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik	99,20%	100,00%	103%	
		Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi	-	-	-	
2.	Meningkatnya sumber daya pengembangan SDM yang memadai.	Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur	89,88%	98,57%	99,43%	

Indikator Capaian kinerja tahun 2016-2021 sebelum perubahan RPJMD 2016-2021 adalah :

No	Tujuan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif	95%	95%	92%	93%	94%	95%
2.	Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur	90%	88%	82%	83%	84%	85%

Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 untuk bidang sertifikasi dan kompetensi dan dalam rangka peningkatan kompetensi baik kelembagaan maupun sebagai pelaksana uji kompetensi sumber daya manusia.

Capaian indikator sasaran untuk Persentase peserta pengembangan SDM dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik dari tahun 2016 s/d 2018 mengalami peningkatan capaian pada tahun 2017 dari 100% menjadi 97%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 103%.

Indikator sasaran Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur mengalami peningkatan dari tahun 2016 s/d 2018 yaitu

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan BPSDM Provinsi Jambi tercermin dari capaian Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Jambi. Pada tahun 2018, pagu awal tahun anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jambi No. 4 Tahun 2017 untuk BPSDM Provinsi Jambi adalah sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah). Namun pada Triwulan IV berdasarkan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) SKPD, BPSDM Provinsi Jambi mengalami pergeseran pagu. Hal ini dikarenakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi mengalami perubahan (revisi) pagu yang disebabkan adanya pemotongan anggaran dan pemanfaatan kembali untuk kegiatan strategis Provinsi Jambi. Meskipun demikian total pagu anggaran Perubahan BPSDM Provinsi Jambi untuk Tahun 2018 tetap sebesar pagu anggaran murni tahun 2018.

Dapat dijelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2018 (31 Desember 2018) anggaran APBD BPSDM Provinsi Jambi di atas telah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi dengan realisasi serapan anggaran sebesar **94,53%** atau terealisasi sebesar Rp. 12.288.535.023,-.

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan dan output yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, sampai dengan akhir Tahun 2018.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran untuk program ini sebesar 24% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar 0,14% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dari anggaran jasa surat menyurat dapat direalisasikan 96,11% Yaitu antara lain digunakan untuk belanja Materai dan pengiriman surat-surat dinas yang sifatnya harus menggunakan jasa pengiriman surat.
- b. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan 28,18% dari total anggaran program pelayanan

administrasi perkantoran. Untuk tahun 2018 dapat direalisasikan 97,92% yaitu untuk pembiayaan 2 rekening telephone, 1 Rekening Air dan 26 Rekening Listrik termasuk didalamnya biaya berlangganan TV kabel.

- c. Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sama dengan 12,68% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 99,87% yang digunakan untuk belanja jasa cleaning servis gedung kantor dan belanja jasa pembersihan dan perawatan halaman/taman.
- d. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar 5,01% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran dan dapat direalisasikan sebesar 99,20% yaitu untuk pembelanjaan alat tulis kantor seperti kertas, kwitansi, name tag pegawai dan lain-lain sebagaimana terlampir.
- e. Belanja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 2,27% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 77,04% yaitu digunakan untuk belanja cetak seperti Kop surat, amplop, map, dll serta untuk belanja penggandaan.
- f. Belanja Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor sebesar 2,85% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 99,67 % antara lain digunakan untuk belanja alat-alat listrik atau penerangan gedung kantor (terlampir).
- g. Belanja Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 6,45% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 99,95% antara lain digunakan untuk belanja surat kabar/majalah dan belanja modal aset tetap lainnya seperti belanja buku perpustakaan.
- h. Belanja Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 5,06% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat

direalisasikan sebesar 73,90% diantaranya digunakan untuk belanja makan dan minum untuk acara rapat kantor serta belanja makan dan minum untuk tamu.

- i. Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/teknis perkantoran, dianggarkan sebesar 7,19 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 79,94% yaitu antara lain digunakan untuk pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium lainnya(terlampir)
- j. Belanja Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah sebesar 20,60% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, Dapat direalisasikan sebesar 100% yaitu digunakan untuk belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan juga belanja Perjalanan dinas luar daerah.
- k. Belanja Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip, dianggarkan sebesar 3,28 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dapat direalisasikan sebesar 87,88 % yaitu untuk pembelanjaan penyediaan bahan bakar mesin genset sebanyak 2 (dua) unit dan alat kebutuhan rumah tangga kantor antara lain sebagaimana yang tercantum pada daftar realisasi pencapaian kegiatan/sub kegiatan (terlampir).

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar 24,03% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pembangunan Gedung Kantor sebesar 5,68% dari total anggaran program peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat sebesar 99,55% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Pembelanjaan pengadaan bangunan

gedung kantor, Pembangunan tempat parkir mobil/canopy dan sebagainya (Terlampir).

- b. Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar 11,46% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 93,97% Yaitu digunakan antara lain untuk pembelian pengadaan alat kantor, Pengadaan alat rumah tangga kantor, Pengadaan alat pendingin, Pengadaan peralatan visual studio dan pengadaan peralatan lainnya (terlampir).
- c. Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung sebesar 18,36% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 89,89 % Yaitu digunakan untuk Pembelian peralatan kantor seperti belanja labelisasi aset BPSDM, umbul-umbul, Bendera merah putih uk. besar, Taplak meja serta Perlengkapan untuk kamar Mes BPSDM.
- d. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar 11,69% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 99,93% Yaitu Pembelian pemeliharaan gedung kantor dan bangunan serta Pembiayaan Honorarium petugas keamanan/satpam kantor BPSDM.
- e. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar 12,57% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 92,66% Yaitu digunakan untuk Pembiayaan petugas sound system dan elektronik lainnya, Petugas penjaga asrama/barak serta Pembelian pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
- f. Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar 29,03% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 98,67%, Yaitu digunakan untuk Pembelian perencanaan dan pengawasan diantaranya Rehab rumah dinas, rehab ruang Arsip Kantor BPSDM, rehab ruang belajar 1 serta rehab saluran drainase kantor BPSDM.

- g. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas sebesar 7,93% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 90,39% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan Honorarium petugas supir, Pembelanjaan Jasa servis Kendaraan roda empat dan roda dua serta Pembiayaan atas Pajak Kendaraan bermotor kantor.
- h. Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 3,27% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur. Dapat direalisasikan sebesar 99,41% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan peralatan Pemasangan Instalasi listrik kantor BPSDM.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,35% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Dari anggaran peningkatan Disiplin Aparatur tersebut dapat direalisasikan sebesar 97,67% dapat terealisasi, Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan pakaian dinas harian pegawai BPSDM dan Pakaian seragam satpam beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal)

Anggaran untuk program ini sebesar 2,93% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2,93 % dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar 84,07 % yaitu untuk pembelanjaan setoran kontribusi dan belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur BPSDM.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran untuk program ini sebesar 0,37% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD sebesar 0,37 % dari total anggaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 96,65 % yaitu untuk pembelanjaan honorarium Operator LPPK/Teptra, belanja penyusunan profil lembaga, belanja cetak, belanja pengandaan dan belanja makan minum rapat.

6. Program Manajemen Pelayanan Kediklatan

Anggaran untuk program ini sebesar 2,45% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kediklatan sebesar 51,95% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 81,97%, yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan pengadaan materi kit, naskah paparan dan hasil, Pembiayaan Honorarium Narasumber dan Moderator, Pembiayaan Dokumentasi/Publikasi serta Pembiayaan makan dan minum peserta rapat, Narasumber dan tamu pusat.
- b. Belanja Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat sebesar 48,05% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut dapat

direalisasikan sebesar 99,85% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan pengiriman dokumen, Pengadaan Instrumen IKD dan laporan hasil money, Pembelanjaan akomodasi dan konsumsi rapat serta Pembelanjaan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.

7. Program Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar 45,61% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan bagi PNS Daerah sebesar 17,26% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 95,87%, Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai, Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodasi dan Konsumsi Diklat (Terlampir).
- b. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sebesar 17,87% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 97,01%, Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai, Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat BPSDM (Terlampir).
- c. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional bagi PNS sebesar 24,38% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari

anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 94,69% Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai , Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat BPSDM (Terlampir).

- d. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial sebesar 40,49% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 93,31%, Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai , Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Terlampir).

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menyiapkan aparatur yang kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi melalui sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2018 menggambarkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi hingga akhir Tahun 2018.

Pengukuran kinerja kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan capaian kinerja Tahun 2018. Dapat dilaporkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah mencapai target-target sasaran yang terangkum dalam Perjanjian Kinerja, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang kurang maksimal capaian targetnya disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja pengawasan terhadap fungsi-fungsi pelayanan kediklatan.

Meskipun demikian secara keseluruhan dengan menggunakan indikator kinerja tujuan, dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018 telah mencapai target dengan kriteria :

- a. **“Sangat Berhasil”** untuk tujuan 1 : Mengembangkan sistem pengembangan SDM aparatur yang efektif
- b. **“Berhasil”** untuk tujuan 2 : Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pengembangan SDM aparatur

Pengukuran kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi serapan anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2018, dari anggaran sebesar Rp 13.000.000.000,- telah direalisasikan sebesar 94,53% dengan rincian realisasi per program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, telah direalisasikan sebesar 94,90%.
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, telah direalisasikan sebesar 95,33 %.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, telah direalisasikan sebesar 97,67%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal), telah direalisasikan sebesar 84,07%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, telah direalisasikan sebesar 96,65%.
- f. Program Manajemen Pelayanan Kediklatan, telah direalisasikan sebesar 90,56%.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, telah direalisasikan sebesar 94,75%.

B. S A R A N

Perkembangan aparatur akan dipengaruhi oleh kondisi dan tuntutan aspirasi masyarakat yang selalu berubah, sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi dinamika lingkungan strategis mereka, maka diperlukan strategi menata aparatur yang berkualitas dan berdaya saing. Maka itu, diperlukan kebijakan :

1. Membangun manajemen publik yang bercirikan good governance,
2. Membangun administrasi publik yang memungkinkan terwujudnya keseimbangan baru antara peranan pemerintah dan peran masyarakat,
3. Mempersiapkan unsur-unsur organisasi yang mendukung terwujudnya administrasi publik yang memenuhi kriteria good governance dan menjamin keseimbangan baru.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki peranan penting . Agar peran yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dapat diwujudkan, maka diperlukan adanya penguatan antara lain penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai termasuk didalamnya anggaran dan aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

